



# 100 HARI ASTA CITA EKONOMI, MEMUASKAN?



Penulis:  
Tim Peneliti

Center of Macroeconomics and Finance INDEF  
| Januari 2025

| Tim Penulis  
Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF

M. Rizal Taufikurahman

Eko Listiyanto

Riza Annisa Pujarama

Abdul Manap Pulungan

M. Syamil Iklil Abd Barr

Panji Ali Mustakim

Aisyah Nuraeni

## DAFTAR ISI

	Hal
RINGKASAN	iv
PENDAHULUAN	1
EVALUASI ASTA CITA 8 PROGRAM TERBAIK DAN TERCEPAT PRABOWO-GIBRAN	4
KONDISI FISKAL 100 HARI PRABOWO-GIBRAN	8
EVALUASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)	12
ANGGARAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS SANGAT FANTASTIS DITENGAH KONDISI FISKAL TERBATAS	16
100 HARI CAPAIAN BEBERAPA INDIKATOR MAKROEKONOMI	21
100 HARI CAPAIAN BEBERAPA INDIKATOR KEUANGAN	34
REKOMENDASI KEBIJAKAN	43
DAFTAR PUSTAKA	45

## RINGKASAN

Konteks politik Indonesia, 100 hari pertama pemerintahan senantiasa menjadi sorotan publik, pengamat, dan pemangku kepentingan. Periode ini tidak sekadar dianggap sebagai fase awal, melainkan sebagai ujian nyata yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan janji politiknya. Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memulai tugas mereka di tengah ekspektasi publik yang tinggi dan tuntutan yang besar untuk membawa perubahan nyata seiring tantangan nasional dan global yang kian kompleks. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis dan konstruktif kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama, khususnya dalam tiga pilar, yakni kebijakan, makroekonomi, dan keuangan.

Prabowo-Gibran memulai 100 hari pertamanya dengan meluncurkan program strategis melalui Asta Cita, termasuk delapan prioritas nasional dan program cepat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan fasilitas kesehatan, kenaikan gaji guru, dan pembangunan rumah gratis. Program-program ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap isu-isu mendesak seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan, di sisi lain tantangan utama muncul, mencakup: keberlanjutan anggaran, distribusi logistik, pengawasan pelaksanaan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah terpencil, meski harus kalang kabut mencari anggarannya. Keberhasilan visi Indonesia Emas 2045 akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut melalui strategi fiskal yang berkelanjutan, penguatan infrastruktur, dan pelibatan ekonomi lokal secara lebih luas.

Dalam 100 hari pertama Prabowo-Gibran, kondisi fiskal menghadapi tekanan berat akibat peningkatan utang jatuh

tempo, perlambatan penerimaan pajak, serta kebutuhan belanja yang terus meningkat untuk mendanai program prioritas. Indikator makroekonomi utama, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar Rupiah, dan harga minyak mentah, bergerak di bawah target, yang memperbesar tekanan pada APBN serta meningkatkan risiko fiskal bagi generasi mendatang. Meskipun ada sedikit peningkatan penerimaan pajak pada triwulan IV 2024, realisasi keseluruhan masih jauh dari target. Kondisi yang demikian menggambarkan perlunya diversifikasi sumber penerimaan pajak untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Keputusan pemerintah untuk membatalkan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen memberikan ruang bagi dunia usaha, namun sekaligus mengurangi potensi penerimaan negara sebesar Rp75,29 triliun. Insentif fiskal sebesar Rp265,5 triliun yang dialokasikan untuk mendukung keadilan pajak juga memerlukan evaluasi ketat untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara. Dengan tantangan berat ini, pemerintah perlu merancang strategi fiskal yang lebih tegas dan berimbang untuk menjaga stabilitas jangka pendek sambil memastikan keberlanjutan ekonomi.

MBG menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah kondisi fiskal yang sangat ketat pada 2025. Anggaran satu paket nasi dikoreksi beberapa kali, hingga akhirnya jatuh pada Rp10.000 Rupiah. Estimasi kebutuhan anggaran MBG yang dihitung INDEF adalah sebesar Rp215,54 triliun, dengan penerima manfaat 82,9 juta orang. Sementara itu, anggaran yang dialokasikan pada APBN sebesar Rp71 triliun, ditargetkan dapat mencapai 15-17,5 juta penerima manfaat. Namun kemudian, Badan Gizi Nasional menyatakan bahwa anggaran Rp71 triliun, hanya cukup untuk menjalankan program hingga pertengahan 2025. Dengan demikian, MBG membutuhkan tambahan dana sebesar Rp100 triliun hingga

akhir tahun. Hal ini berarti, kebutuhan anggaran MBG akan jauh lebih besar untuk memenuhi target 82,9 juta penerima manfaat. Dalam rangka mengatasi kesenjangan anggaran, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara yang mencakup pemangkasan anggaran non-esensial seperti belanja operasional, perjalanan dinas, dan hibah. Pertanyaannya adalah bagaimana pengalokasian penghematan tersebut? Apakah semua anggaran hanya untuk mendukung MBG?.

Selama 100 hari pertama Prabowo-Gibran, makroekonomi tertekan. Penurunan inflasi lebih disebabkan penurunan daya beli dan harga komoditas dunia. Inflasi akhir 2024, bahkan. Lebih rendah dari inflasi saat Pandemi COVID-19 (2020). Meski menurun, harga beberapa komoditas penting malah menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun lalu. Indikator kesejahteraan juga tidak begitu menggembirakan di tengah penurunan inflasi. Hal itu terlihat dari Nilai Tukar Petani (tanaman pangan dan perikanan) yang turun dibandingkan tahun lalu. Padahal, dua sektor tersebut menjadi lumbung kemiskinan. Jadi, tidak ada yang istimewa dari penurunan inflasi.

Penurunan inflasi gagal mendorong Bank Indonesia mengoreksi suku bunga acuan yang lebih cepat. Bank Indonesia justru menaikkan bunga acuan 25 basis point (bps) pada April 2024 dan menurunkannya pada September 2024. Selain menyoroti koreksi bunga acuan, satu hal yang memunculkan pertanyaan adalah apakah BI rate diacu perbankan atau tidak? Sebagai lembaga yang bertujuan mendapatkan laba maksimal (profit maximization) tentu bank akan lebih melirik Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). SRBI menjadi instrumen investasi berimbang hasil tinggi bagi bank. Hal inilah yang menyebabkan perbankan abai terhadap fungsi intermediasi serta

menyebabkan yield SBN meningkat. Peningkatan yield SBN menyebabkan beban fiskal semakin mahal.

Nilai tukar terus tertekan yang menyebabkan realisasinya jauh dari asumsi APBN. Dalam beberapa periode pemerintah, kinerja nilai tukar dalam 100 hari pertama pemerintahan bervariasi. Namun, depresiasi (realisasi lebih tinggi dari target) tertinggi terjadi pada pemerintahan Prabowo. Pada Oktober, realisasi nilai tukar mencapai Rp15.732 di mana asumsi APBN-2024 sebesar Rp15.000 per USD. Sementara pada November dan Desember masing-masing terealisasi Rp15.864 dan Rp16.162 per USD. Margin realisasi dan target nilai tukar yang begitu lebar sangat merugikan, bukan hanya bagi pemerintah tetapi juga swasta. Menurut analisis sensitivitas APBN-2024, depresiasi Rupiah sebesar Rp100 per USD menyebabkan lonjakan defisit APBN hingga Rp6,2 triliun.

Lazy bank menjadi tabiat perbankan karena ‘difasilitasi’ instrumen-instrumen zero risk. Porsi penempatan dana bank ke kredit semakin menurun sedangkan porsi ke surat berharga terus meningkat. Pada 2004, porsi penempatan dana bank ke surat berharga hanya 4 persen; meningkat menjadi 5,9 persen pada 2009. Sementara itu pada 2014, penempatan ke surat berharga mencapai 11,64 persen sedangkan pada 2019 dan 2024 masing-masing 12,22 persen dan 19,23 persen. Tahun 2024, kredit tumbuh di bawah 10,5 persen sedangkan 2004 bisa tumbuh lebih tinggi, di atas 11,5 persen. Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan mencapai 90 persen pada akhir 2024; menurun dari 2023 sebesar 93,64 persen.



# PENDAHULUAN

Konteks politik Indonesia, 100 hari pertama pemerintahan senantiasa menjadi sorotan publik, pengamat, dan para pemangku kepentingan. Periode ini tidak sekadar dianggap sebagai fase awal, melainkan sebagai ujian nyata yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan janji politiknya. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memulai tugas mereka di tengah ekspektasi publik yang tinggi dan tuntutan yang besar untuk membawa perubahan nyata di tengah tantangan nasional dan global yang kian kompleks.

Masa awal pemerintahan sering kali menjadi indikator kritis untuk menilai arah kebijakan dan prioritas yang ditempuh pemimpin baru. Dalam 100 hari pertama ini, masyarakat berhak mengetahui apakah pemerintah mampu menerjemahkan visi dan misi mereka menjadi kebijakan konkret yang berdampak langsung. Kebijakan strategis, terutama dalam bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan, menjadi barometer penting dalam menilai sejauh mana pemerintah mampu mengatasi tekanan domestik dan global. Evaluasi ini tidak hanya mencermati janji kampanye, tetapi juga menuntut kejelasan tentang sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Kebijakan awal pemerintahan, khususnya di sektor ekonomi, keuangan, dan perbankan, harus diuji efektivitasnya sejak dini. Walaupun hasil jangka panjang belum dapat terlihat, dampak awal dapat memberikan gambaran konkret tentang kapasitas pemerintah dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk menilai apakah langkah awal yang diambil telah sesuai harapan atau hanya sekadar retorika politik tanpa pijakan nyata.

Melalui pendekatan berbasis data dan analisis, evaluasi ini menyoroti isu-isu strategis mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, pengelolaan anggaran negara, hingga stabilitas sektor keuangan dan peran perbankan dalam mendukung pembangunan nasional.

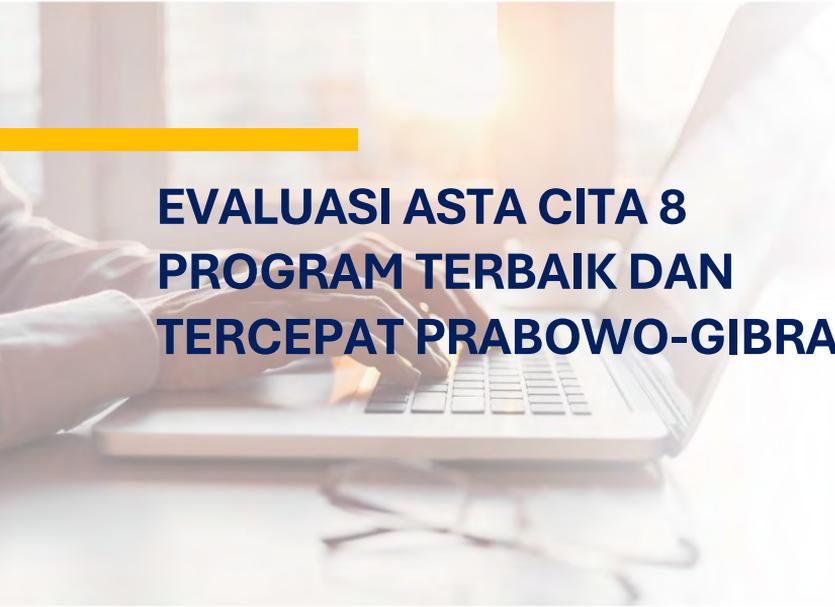
INDEF memandang bahwa evaluasi 100 hari pertama kinerja pemerintahan bukan hanya soal menilai keberhasilan, melainkan menjadi langkah kritis untuk menyingkap sejauh mana pemerintah memahami kebutuhan rakyat dan mampu menjawab tantangan yang ada. Ini adalah momen penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya sekadar pencitraan politik, tetapi benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa evaluasi yang serius, pemerintah berisiko kehilangan kepercayaan publik yang sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan sosial.

Pada masa awal pemerintahan, ekspektasi publik berada pada puncaknya. Evaluasi ini menjadi alat untuk mengukur, apakah pemerintah mampu memenuhi harapan tersebut atau justru gagal memberikan solusi atas persoalan yang mendesak. Selain itu, transparansi dalam 100 hari pertama mencerminkan komitmen pemerintah terhadap prinsip akuntabilitas. Ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan hasil nyata dalam periode ini dapat menjadi sinyal buruk bagi perjalanan pemerintahannya ke depan.

Evaluasi ini juga memiliki peran penting dalam memperkuat partisipasi publik. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berperan sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. Dengan masukan yang berbasis fakta, evaluasi ini diharapkan dapat menjadi alat untuk menekan pemerintah agar lebih bertanggung jawab dan responsif. Kritik yang disampaikan bukanlah serangan, melainkan bentuk

kepedulian yang dapat digunakan untuk memperbaiki arah kebijakan secara fundamental.

Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis dan konstruktif kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama, khususnya dalam tiga pilar utama, yakni kebijakan, makroekonomi, dan keuangan-perbankan. Ketiga pilar ini bukan hanya pilar stabilitas nasional, tetapi juga menjadi penentu utama daya saing dan pembangunan Indonesia ke depan. INDEF menyoroti kebijakan-kebijakan strategis, menganalisis efektivitas implementasi, dan memberikan pandangan kritis terhadap dampak yang dihasilkan.



**EVALUASI ASTA CITA 8  
PROGRAM TERBAIK DAN  
TERCEPAT PRABOWO-GIBRAN**

# EVALUASI ASTA CITA 8 PROGRAM TERBAIK DAN TERCEPAT PRABOWO-GIBRAN

Pemerintahan Prabowo-Gibran menetapkan visi ambisius "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045," yang dituangkan dalam Asta Cita, sebuah rencana strategis yang mencakup delapan prioritas: ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan. Untuk mencapai visi ini, pemerintah merumuskan 17 program prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat, yang dirancang untuk dicapai dalam 100 hari pertama pemerintahan.

Beberapa langkah nyata telah diambil, seperti peluncuran MBG, pembangunan rumah sakit berkualitas, kenaikan gaji guru, pembangunan rumah gratis, dan upaya perluasan basis pajak melalui aplikasi *Coretax*, meskipun pembentukan Badan Penerimaan Negara dibatalkan.

Program MBG, yang dimulai pada 6 Januari 2025, beroperasi di 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi, dengan keterlibatan 140 UMKM. Namun, skala program ini mengundang pertanyaan tentang keberlanjutan, efektivitas distribusi, dan dampak jangka panjangnya pada sektor pangan lokal.

Sementara itu, inisiatif Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) direncanakan mulai Februari 2025, meskipun petunjuk teknisnya sudah dikeluarkan pada Januari 2024. Proyek peningkatan tipe RSUD Reda Bolo di Sumba Barat Daya menjadi salah satu contoh fokus pemerintah pada fasilitas kesehatan di daerah terpencil, dengan target selesai pada Desember 2025. Namun, upaya ini harus diimbangi dengan solusi atas kendala

sumber daya manusia medis dan fasilitas pendukung menjadi hambatan di wilayah terpencil.

Dalam sektor pendidikan, pengumuman kenaikan gaji guru per 2025 menjadi langkah positif, tetapi keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada realisasi anggaran dan distribusi yang adil antara guru ASN dan non-ASN. Di bidang perumahan, program pembangunan rumah gratis, yang dimulai pada November 2024 di Kabupaten Tangerang, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, pelaksanaan proyek ini membutuhkan pengawasan ketat untuk memastikan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesenjangan wilayah.

#### Daftar 8 Program Hasil Terbaik Cepat dan Pelaksanaan dalam 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran di 2025

No	8 Program Hasil Terbaik Cepat	Implementasi 100 Hari Kerja
1	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil.	Makan Bergizi Gratis dimulai 6 Januari 2025.
2	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.	Pada 17 Januari mulai dilakukan peningkatan tipe RSUD Reda Bolo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dari C ke D
3	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.	Belum dimulai, akan dilakukan di 2025.
4	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.	Belum dimulai, akan dilakukan di 2025.

5	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.	Belum dimulai, akan dilakukan di 2025.
6	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.	Diumumkan tanggal 28 November 2024, dilaksanakan mulai Januari 2025.
7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah-rumah murah bersantitas baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	Dimulai pada 1 November 2024, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait groundbreaking pembangunan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Tangerang.
8	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB ke 23%.	Badan Penerimaan Negara urung dibentuk. Tapi upaya peningkatan penerimaan negara dilakukan dengan perbaikan administrasi dilakukan dengan diluncurkan aplikasi coretax.

Sumber: Berbagai sumber, diolah INDEF (2025)

Meskipun pembentukan Badan Penerimaan Negara dibatalkan, peluncuran aplikasi Coretax menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak melalui modernisasi administrasi. Namun, tanpa struktur kelembagaan yang kuat, efektivitas langkah ini masih dipertanyakan. Terlebih lagi, setelah 1 bulan aplikasi Coretax diluncurkan, ternyata masih banyak kendala teknis di lapangan. Secara keseluruhan, meskipun langkah-langkah awal ini memberikan gambaran optimis, keberhasilan visi Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh implementasi yang konsisten, transparan, dan berkelanjutan.



**KONDISI FISKAL 100 HARI  
PRABOWO-GIBRAN**

# KONDISI FISKAL 100 HARI PRABOWO-GIBRAN

Kapasitas fiskal akan menjadi tantangan signifikan bagi Pemerintah pada tahun 2025. Lonjakan utang jatuh tempo yang harus dikelola bersamaan dengan perlambatan penerimaan perpajakan memperumit situasi. Sementara itu, kebutuhan belanja terus meningkat akibat bertambahnya program prioritas, mendorong Pemerintah mengintensifkan efisiensi fiskal dan penerimaan pajak.

Pemerintahan Prabowo-Gibran memulai periode kerjanya di tengah perlambatan indikator makroekonomi dan fiskal. Pada kuartal IV 2024, sejumlah indikator utama menunjukkan performa yang tidak sesuai target. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5 persen, meleset dari target 5,2 persen. Rupiah terdepresiasi hingga Rp16.162 per USD, jauh dari asumsi Rp15.000 per USD, dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) melonjak ke 7 persen dibandingkan target 6,7 persen. Sementara itu, harga minyak bumi Indonesia di pasar global tercatat hanya 71,6 USD per barel, lebih rendah dari asumsi USD82 per barel.

Pelemahan nilai tukar Rupiah dan kenaikan imbal hasil SBN memperberat tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dari segi penerimaan maupun beban utang masa depan. Kondisi ini dapat memperbesar risiko fiskal antargenerasi, dengan beban utang yang semakin berat bagi generasi mendatang.

Dalam penerimaan perpajakan, meskipun terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2023, realisasi sementara 2024 tidak mencapai target APBN sebesar Rp2.309,9 triliun. Pemerintah hanya mampu mengumpulkan Rp2.232,7 triliun,

dengan selisih Rp77,2 triliun. Namun, peningkatan penerimaan di triwulan IV 2024 menjadi titik terang, didukung oleh pertumbuhan PPh Badan serta kontribusi sektor pertambangan dan manufaktur. Meskipun demikian, pencapaian ini menunjukkan ketergantungan besar pada sektor-sektor tertentu, menggarisbawahi perlunya diversifikasi basis pajak.

Keputusan Presiden untuk membatalkan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025 menjadi dilema strategis. Kenaikan tarif ini diperkirakan dapat menambah penerimaan negara hingga Rp75,29 triliun. Di sisi lain, pembatalan tersebut dianggap mengakomodasi kekhawatiran dunia usaha terhadap potensi tekanan ekonomi. Sebaliknya, PPN barang mewah tetap dinaikkan menjadi 12 persen, dengan potensi penerimaan tambahan antara Rp1,5 hingga Rp3,5 triliun. Kebijakan ini, meskipun memberikan kontribusi fiskal, hanya berdampak marginal pada kapasitas penerimaan secara keseluruhan.

### Perkembangan Asumsi Dasar Makroekonomi 2024

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Pertumbuhan Ekonomi (% ,yoy)	5,2	5	▼
2	Inflasi (% ,yoy)	2,8	1,57	▲
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD, eop)	15.000	16.162	▼
4	Yield SBN 10 Tahun (% ,eop)	6.7	7	▼
5	ICP (USD/barrel)	82	71,6	▼
6	Lifting Minyak (Ribu BPH)	635	571.7	▼
7	Lifting Gas (Ribu BSMPh)	1.033	973	▼

Sumber: Konferensi Pers APBN 2024, 6 Januari 2025, Kementerian Keuangan (<https://www.youtube.com/watch?v=vII7yvkZhc&t=3324s>)

Catatan:

▼	Tidak Memenuhi Target
▲	Memenuhi Target

Di sisi lain, Pemerintah tetap menyediakan insentif terkait kebijakan PPN sebesar Rp265,5 triliun untuk mendorong keadilan fiskal. Namun, alokasi insentif yang signifikan ini perlu dievaluasi efektivitasnya dalam memberikan dampak langsung pada penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, sebenarnya peningkatan PPN 12 persen yang diikuti dengan insentif kebijakan sudah menggambarkan bahwa negara sejak awal sudah kehilangan potensinya mendapat tambahan pendapatan dari peningkatan pajak karena nilai insentif yang diberikan jauh lebih besar dari potensi penerimaannya.

Secara keseluruhan, tahun 2025 akan menjadi ujian berat bagi strategi fiskal Pemerintah. Diperlukan pendekatan yang lebih berani dan terukur untuk mengatasi tantangan penerimaan perpajakan, efisiensi belanja, serta pengelolaan utang. Selain itu, kebijakan yang diambil harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan fiskal jangka pendek dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.



**EVALUASI PROGRAM MAKAN  
BERGIZI GRATIS (MBG)**

# EVALUASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

MBG merupakan program unggulan Prabowo-Gibran. Program ini didasarkan pada pengamatan holistik kegiatan anak-anak di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, data menunjukkan bahwa 32 persen dari 45 juta anak sekolah di Indonesia menderita anemia; 41 persen dari 45 juta anak sekolah di Indonesia tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah; dan 58 persen dari 45 juta anak sekolah di Indonesia pola makannya tidak sehat.

Desain awal program ini terbilang ambisius, dengan target penerima mencapai 82 juta orang, termasuk 44 juta anak sekolah, 4 juta santri, 30 juta balita, dan 4 juta ibu hamil. Untuk memenuhi kebutuhan gizi kelompok ini, program MBG memerlukan pasokan pangan dalam jumlah besar, antara lain 1,9 juta ton beras, 5,6 juta ton daging dan telur ayam, 3,3 juta ton buah, serta 1,8 juta ton sayuran per tahun. Program ini juga mengandalkan sekitar 48.000 dapur atau unit pelayanan untuk melayani 439.000 sekolah. Namun, skala besar ini menimbulkan tantangan signifikan dalam rantai pasokan, distribusi, dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Model pelaksanaan MBG mengadopsi konsep lingkaran manfaat, di mana bahan makanan diutamakan berasal dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal di sekitar sekolah. Susu diprioritaskan dari produksi dalam negeri, sementara pengolahan makanan dipercayakan kepada koperasi atau ibu-ibu yang tinggal dekat unit pelayanan. Anggaran langsung disalurkan dari Pemerintah Pusat ke Unit Pelayanan, dengan menu yang disesuaikan dengan ketersediaan pangan unggulan di setiap daerah. Aspek gizi juga menjadi perhatian utama, di

mana komposisi kalori dan protein disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan anak dan ibu hamil. Program ini diklaim diawasi langsung oleh Presiden untuk memastikan efektivitasnya.

Pada tingkat kebijakan, pelaksanaan program ini ditangani oleh Badan Gizi Nasional, yang dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024. Badan ini bertanggung jawab atas pemenuhan gizi nasional dengan penerima mencakup peserta didik berbagai jenjang pendidikan, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Meskipun MBG memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan kelompok rentan, implementasi dalam skala nasional menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek kapasitas fiskal dan keberlanjutan anggaran. Dengan target 82 juta penerima, kebutuhan pendanaan sangat besar sehingga tanpa perencanaan keuangan yang matang, program ini berisiko menambah tekanan fiskal, terutama jika penerimaan negara tidak mencapai target. Selain itu, efisiensi rantai pasok dan infrastruktur logistik menjadi perhatian utama, mengingat keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil serta ketergantungan pada produksi lokal yang fluktuatif. Jika distribusi tidak berjalan optimal, terdapat kemungkinan ketidakseimbangan suplai antarwilayah yang berpotensi menghambat efektivitas program ini.

Selain faktor teknis, dampak pada pasar dan sektor swasta juga harus dipertimbangkan. Pembelian bahan pangan dari petani, peternak, dan UMKM lokal memang dapat meningkatkan kesejahteraan produsen kecil, tetapi tanpa pengawasan ketat, ada risiko monopoli dalam rantai pasokan yang justru dapat menghambat persaingan sehat. Tantangan tata kelola dan potensi penyimpangan juga tidak bisa diabaikan,

mengingat besarnya anggaran yang langsung disalurkan ke Unit Pelayanan, yang berpotensi menimbulkan korupsi dan inefisiensi jika mekanisme pengawasannya lemah.

Lebih jauh, efektivitas program ini dalam mengubah pola konsumsi masyarakat juga masih menjadi tanda tanya besar. Jika tidak dibarengi dengan edukasi gizi yang tepat, dampak jangka panjang program ini terhadap perbaikan pola makan bisa terbatas, membuat investasi besar ini tidak mencapai manfaat maksimal yang diharapkan.



**ANGGARAN PROGRAM MAKAN  
BERGIZI GRATIS SANGAT  
FANTASTIS DI TENGAH KONDISI  
FISKAL TERBATAS**

# ANGGARAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS SANGAT FANTASTIS DI TENGAH KONDISI FISKAL TERBATAS

Program MBG pada perjalanannya mengalami perubahan pada penganggaran. Dengan jumlah total penerima manfaat 82,9 juta jiwa, awalnya biaya paket nasi per orang dianggarkan sebesar 25.000 Rupiah. Kemudian anggaran berubah dan jumlah penerima manfaat dilakukan secara bertahap. Hingga akhirnya anggaran per paket nasi per orang sebesar Rp10.000, dengan jumlah penerima manfaat tahap pertama di 2025 ditargetkan hingga 17,5 juta orang.

## Perkembangan Perubahan Anggaran MBG

Paket makan per orang (dalam Rupiah)	Jumlah penerima manfaat (juta jiwa)	Biaya sekali makan per paket nasi (triliun Rupiah)	Jumlah hari (dalam setahun)	Kebutuhan Anggaran Makan Bergizi Gratis (triliun Rupiah)
25.000	82,9	2,0725	260	538,85
18.000	82,9	1,4922	260	387,97
15.000	82,9	1,2435	260	323,31
10.000	82,9	0,829	260	215,54

Sumber: Berbagai sumber, diolah INDEF (2025)

Catatan: Jumlah hari dihitung berdasarkan hari kerja dalam satu tahun.

Kebutuhan anggaran MBG sangat cukup besar dengan kondisi APBN yang ketat. APBN di 2025 membutuhkan pembiayaan yang sangat besar diantaranya karena: utang jatuh tempo dan bunganya yang melonjak tinggi hingga mencapai lebih dari Rp 1.353,2 triliun; terdapat beberapa program tambahan janji kampanye yang harus dibiayai; hingga tambahan anggaran untuk kabinet yang gemuk . Hal ini menjadi tantangan yang sangat berat karena penerimaan perpajakan negara masih

sangat terbatas, bahkan rasionya terhadap PDB terus mengalami perlambatan.

Anggaran MBG pada APBN 2025 masuk ke dalam anggaran Pendidikan yaitu sebesar 71 triliun. Angka ini jauh lebih kecil dari kebutuhan sebesar 215,54 triliun Rupiah untuk target penerima manfaat 82,9 juta orang dengan biaya paket nasi Rp 10.000 per orang.

Angka estimasi kebutuhan MBG sebesar 215,54 triliun Rupiah ini, jauh lebih besar dari belanja modal dan belanja bantuan sosial Pemerintah Pusat pada APBN 2025. Belanja Modal yang merupakan belanja produktif yang dapat mendorong dampak pengganda lebih besar pada perekonomian hanya anggarannya sebesar 190,64 triliun Rupiah, persinya 7,08 persen dari total belanja Pemerintah Pusat.

MBG butuh tambahan 100 Triliun di 2025, Instruksi Presiden Diterbitkan. Menurut Badan Gizi Nasional yang dikutip sejumlah media pemberitaan di Indonesia mengumumkan bahwa pada 2025, program MBG dibagi dalam 3 tahap yaitu:

#### Tahapan Program MBG 2025

Tahap	Periode	Penerima Manfaat	Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi
Tahap 1	Januari-April 2025	3 juta orang	937
Tahap 2	April-Agustus 2025	6 juta orang	2000
Tahap 3	Agustus-Desember 2025	15-17,5 juta orang	5000

Sumber: Berbagai sumber, diolah INDEF (2025)

Anggaran Rp71 triliun untuk MBG tahun 2025 sudah dinyatakan hanya akan mencukupi hingga tengah tahun 2025. Kepala Badan Gizi Nasional bahwa program MBG membutuhkan dana tambahan Rp100 triliun hingga akhir

periode 2025. Skenario kebutuhan dana tambahan untuk MBG ini direspons berbagai pejabat negara lainnya dengan misalnya meminta daerah untuk memberikan tambahan dari APBD, penggunaan zakat masyarakat, hingga patungan bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), bahkan Bank Indonesia disebutkan sedang mempersiapkan tambahan dana program MBG.

Kondisi fiskal pemerintah yang ketat, membuat Presiden akhirnya mengeluarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam Inpres tersebut efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun terdiri atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp256,1 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp50,95 triliun. Pada aturan tersebut ditegaskan bahwa efisiensi belanja pada Kementerian/Lembaga tidak dilakukan pada belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Efisiensi belanja dilakukan pada: belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Aturan ketat efisiensi anggaran untuk Gubernur dan Bupati/Wali Kota, yaitu: (i) Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*Focus Group Discussion*; (ii) mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen; (iii) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional; (iv) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur; (v) Memfokuskan alokasi anggaran belanja

pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya; (vi) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga. Efisiensi anggaran yang diatur melalui Inpres tersebut satu sisi memiliki potensi dampak positif dalam menjaga keberlanjutan fiskal, tetapi sisi lain, efektivitasnya sangat bergantung pada realisasi implementasi yang transparan dan pengawasan ketat.



**100 HARI CAPAIAN  
BEBERAPA INDIKATOR  
MAKROEKONOMI**

# 100 HARI CAPAIAN BEBERAPA INDIKATOR MAKROEKONOMI

## Tingkat Inflasi

Dalam beberapa periode pemerintah, inflasi nasional cenderung turun. Dalam 100 hari pemerintahan SBY I, inflasi cukup tinggi karena dampak kenaikan harga minyak. Setelah itu, inflasi cenderung turun pada periode SBY II. Memasuki periode Jokowi I, inflasi kembali naik dalam level yang lebih tinggi. Kenaikan tersebut merupakan dampak gejolak global, terutama kenaikan harga komoditas. Pada 100 hari Jokowi II, inflasi cenderung menurun karena ekonomi global lesu. Hal itu tidak terlepas dari dampak perang dagang yang memanas.



Grafik Inflasi 100 Hari Pertama Pemerintahan SBY-Prabowo

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025, diolah

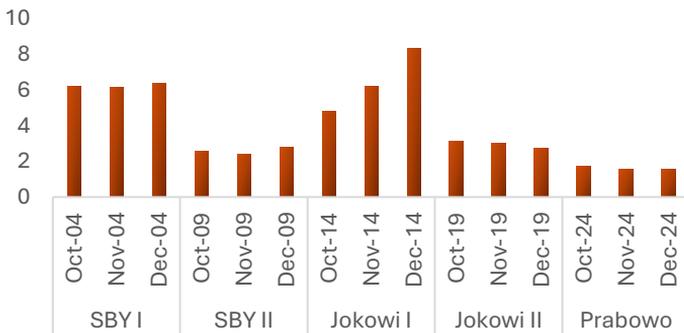
Pada 100 hari Prabowo, inflasi memang turun. Oktober, inflasi hanya 1,71 persen sedangkan pada November dan Desember masing-masing 1,51 persen dan 1,57 persen. Penurunan ini bukan berita baik karena disebabkan oleh penurunan daya beli. Jika tidak membaik, kondisi ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi gagal dicapai. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena inflasi 2024 lebih rendah dari inflasi saat Pandemi COVID-19 tahun 2020.

Dalam memahami inflasi, pemerintah Prabowo perlu memerhatikan beberapa hal penting.

### 1. Penurunan daya beli

Inflasi yang tinggi tidak baik bagi perekonomian karena menyebabkan ekonomi cenderung tumbuh terbatas. Dampak yang sama juga terjadi ketika deflasi. Dalam beberapa dekade terakhir, potret harga umum di Indonesia berbeda. Sebelum 2015, harga umum cenderung mencetak inflasi sedangkan setelahnya menunjukkan beberapa periode deflasi beruntun.

Secara umum, inflasi Indonesia cenderung menurun. Tahun 2004, sebagai awal pemerintahan SBY I, inflasi mencapai 6,22 persen. Pada periode SBY II, inflasi 2,57 persen (Oktober 2009) sedangkan pada Jokowi I mencapai 4,83 persen (Oktober 2014). Pada Jokowi II, inflasi cukup rendah mencapai 3,13 persen sedangkan pada Prabowo mencapai 1,71 persen.



#### Perkembangan Inflasi periode SBY I-Prabowo

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025, diolah

Meski menunjukkan penurunan secara tahunan, inflasi pada 2024 tidak menggembirakan. Hal itu disebabkan karena penurunan daya beli. Selama 2024 terjadi deflasi lima bulan berturut-turut yang belum pernah terjadi sejak 2005. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi

persoalan serius pada daya beli masyarakat selama 2024. Penurunan daya beli tahun 2024 juga lebih parah dibandingkan 2020, saat terjadi Pandemi COVID-19. Saat Pandemi COVID-19, deflasi hanya terjadi tiga bulan berturut-turut. Persoalan deflasi ini harus menjadi perhatian pemerintah Prabowo karena akan berkontribusi dalam mencari pertumbuhan ekonomi sebagaimana diketahui peranan konsumsi rumah tangga masih sangat dominan di dalam komposisi pembentukan PDB Indonesia.

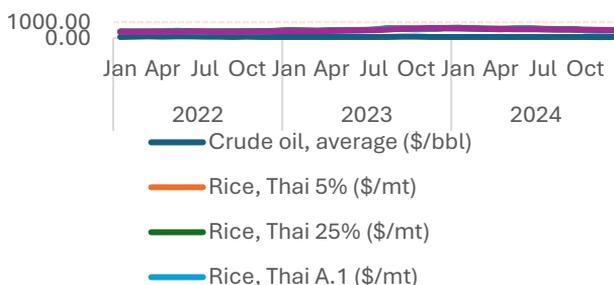
Tabel Kondisi Inflasi/Deflasi 2005-2024

Tahun	Deflasi	Durasi (bulan)	Keterangan
2005	Feb, Apr	2	Tidak berturut-turut
2006	-	-	-
2007	Apr	1	-
2008	Des	1	-
2009	Jan, Apr, Nov	3	Tidak berturut-turut
2010	Mar	1	-
2011	Mar, Apr, Okt	3	Tidak berturut-turut
2012	-	-	-
2013	Apr, Mei, Sep		Tidak berturut-turut
2014	Apr	1	-
2015	Jan, Feb, Sep, Okt	4	Tidak berturut-turut
2016	Feb, Apr, Ags	3	Tidak berturut-turut
2017	Mar, Ags	2	Tidak berturut-turut
2018	Ags, Sep	2	Tidak berturut-turut
2019	Feb, Sep	3	Tidak berturut-turut
2020	Jul, Ags, Sep	3	Berturut-turut
2021	Jun, Sep	2	Tidak berturut-turut
2022	Feb, Ags, Okt	3	Tidak berturut-turut
2023	Ags	1	-
2024	Mei, Jun, Jul, Ags, Sep	5	Berturut-turut

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025, diolah

## 2. Penurunan harga komoditas dunia

Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan inflasi domestik adalah koreksi harga komoditas dunia. Beberapa harga komoditas yang diimpor Indonesia menunjukkan penurunan sejak awal 2024 seperti minyak mentah dan beras. Akhir 2024, harga minyak mentah dunia (rata-rata) mencapai US\$72,31 per barrel. Level tersebut menurun 4,5 persen dibandingkan tahun 2023. Jika mengacu harga tahun 2022, hanya minyak tahun 2024 menurun hingga 7,4 persen. Sementara itu, harga beras dunia (Rice, Thai 5 persen) turun dari US\$644 per mt pada 2023 menjadi US\$527 per mt pada 2024. Penurunan harga beras tersebut mencapai 4,5 persen (yoy).



### Perkembangan Harga Komoditas Impor Indonesia

Sumber: World Bank *Commodity Price*, 2025, diolah

## 3. Harga Komoditas Pangan Masih Naik

Salah satu yang menjadi anomali dalam penurunan inflasi adalah terjadinya peningkatan harga beberapa komoditas pangan utama. Kalkulasi data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (2025) menyimpulkan bahwa rata-rata harga beras, daging

ayam, daging sapi, telur ayam, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, gula pasir masih naik pada 100 hari pemerintahan Prabowo. Sementara itu, cabai merah dan cabai rawit menunjukkan penurunan harga. Dari beberapa komoditas pangan tersebut, kenaikan tertinggi terjadi pada bawang merah mencapai 22,2 persen (yoy) pada Desember 2024 disusul bawang putih (15 persen), daging ayam (8,81 persen) dan minyak goreng (8,5 persen).<sup>1</sup>



### Perubahan Tahunan Harga Komoditas Pangan Strategis Oktober-Desember 2024

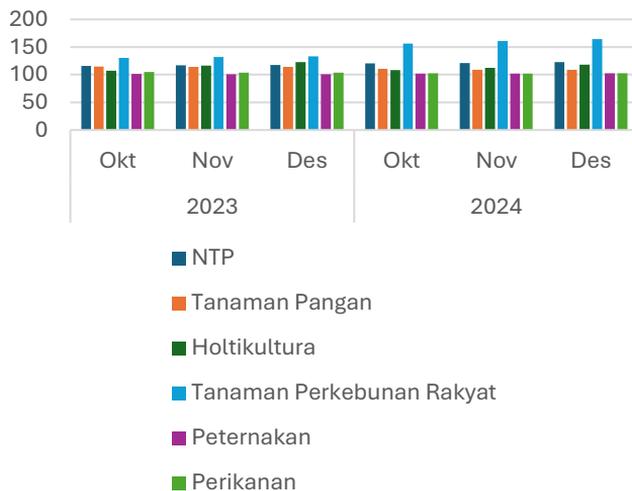
Sumber: Bank Indonesia, 2025, diolah

#### 4. Nilai Tukar Petani Tidak Naik Signifikan

Salah satu ukuran yang dapat memahami apakah penurunan inflasi membantu tingkat kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah adalah pergerakan nilai tukar petani. Secara umum nilai tukar petani pada Oktober, November dan

<sup>1</sup> Dihitung melalui: (i) menghitung rata-rata harga harian selama sebulan; (ii) menghitung perubahan tahunan dari hasil sebelumnya.

Desember 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Oktober 2024 nilai tukar petani mencapai 120,7 yang meningkat dari 115,78 dari tahun sebelumnya. Pada November nilai tukar petani mencapai 121,29 yang meningkat dari 116,73 pada 2023. Nilai tukar petani pada Desember 2024 mencapai 122,78, naik dari 117,76. Namun demikian, beberapa subsektor nilai tukar petani justru menurun. Penurunan tersebut pada sektor-sektor yang menjadi lumbung kemiskinan seperti pertanian dan perikanan. NTP tanaman pangan turun 3,69 poin (yoy) pada Oktober 2024 sedangkan pada November dan Desember masing-masing turun 5,03 dan 5,34 poin. Nilai tukar perikanan masing-masing turun 2,41 poin; 1,76 poin dan 0,89 poin pada Oktober hingga Desember 2024 dibandingkan bulan yang sama tahun 2023.



**Grafik Perkembangan Nilai Tukar Petani**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025, diolah



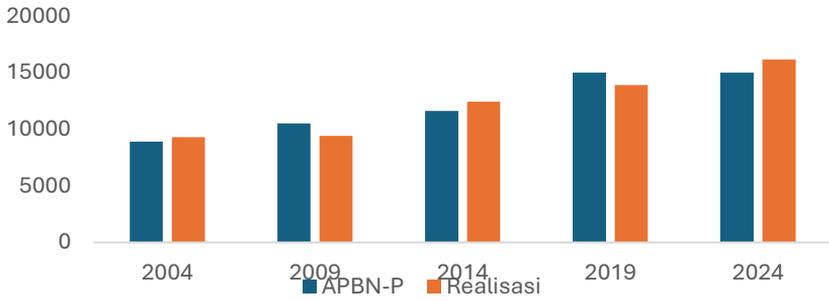
### Perubahan Tahunan Nilai Tukar Petani

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025, diolah

### Nilai Tukar Rupiah Rapuh

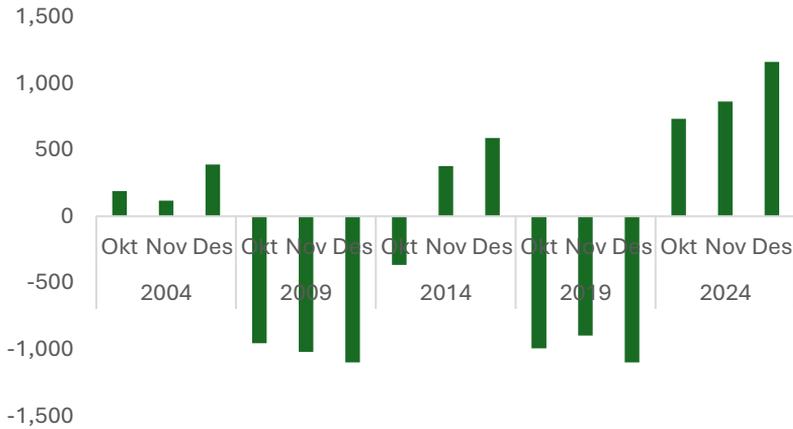
Sektor moneter dan perbankan merupakan sektor pendukung (*enabler*) dalam pertumbuhan ekonomi. Sektor moneter yang stabil tercermin dari pergerakan nilai tukar yang setidaknya sesuai dengan asumsi APBN serta inflasi yang terkendali. Sementara itu, sektor perbankan memainkan peran penting dalam menyediakan pendanaan bagi aktivitas ekonomi. Namun, realitas menunjukkan bahwa kedua sektor ini masih rapuh dan rentan terhadap tekanan eksternal maupun domestik.

Dalam konteks sektor moneter, Bank Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Berulang kali, realisasi dari nilai tukar ini meleset dari asumsi APBN. Hal ini menunjukkan lemahnya daya tahan Rupiah terhadap tekanan global. Ketidakseimbangan ini bukan hanya terjadi di 2024, tetapi dalam beberapa periode pemerintahan sebelumnya. Data menunjukkan bahwa pada bahwa hanya ada tahun 2009 dan 2019, asumsi nilai tukar dalam APBN dapat tercapai.



### Grafik Target dan Realisasi APBN Nilai Tukar Rupiah

Sumber: Bank Indonesia, 2025, diolah

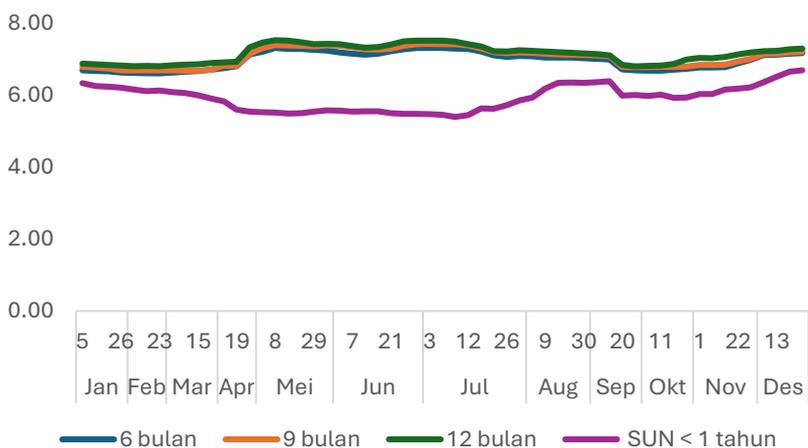


### Grafik Target dan Realisasi APBN Nilai Tukar Rupiah Tiga Bulan Pertama Periode Pemerintah SBY, Jokowi dan Prabowo

Sumber: Bank Indonesia, 2025, diolah

Realisasi nilai tukar yang sering meleset dari target mencerminkan tingginya risiko depresiasi Rupiah. Untuk meredam tekanan tersebut, kebijakan yang diambil cenderung berupa kenaikan suku bunga acuan, yang bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar. Namun, langkah ini membawa konsekuensi lanjutan, di mana suku bunga acuan Indonesia tetap lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara sekawasan (*peer-countries*), sehingga menambah beban bagi sektor riil dan menghambat pertumbuhan kredit perbankan.





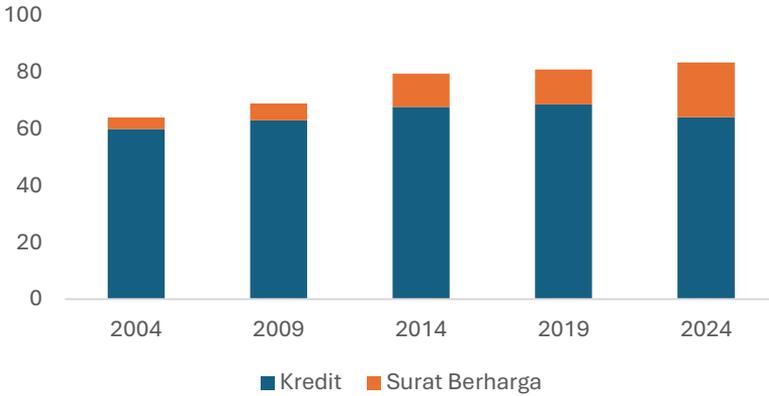
### Perkembangan SRBI dan Yield SUN <1 Tahun

Sumber: Bank Indonesia, 2025, diolah

Kenaikan suku bunga acuan berdampak kontraproduktif terhadap sektor riil karena menyebabkan suku bunga perbankan tinggi. Di tengah permintaan dari sektor riil yang rendah dan suku bunga perbankan tinggi, realisasi pembiayaan cenderung menurun. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak mampu mencapai target APBN. Dalam lima pengamatan 100 hari pemerintahan presiden terpilih dapat dikatakan bahwa pada periode Prabowo penempatan dana perbankan ke kredit semakin rendah. Desember 2024, porsi penyaluran dana perbankan ke kredit sekitar 64,15 persen sedangkan ke surat berharga hampir 20 persen. Pada periode SBY 1, porsi penyaluran dana bank ke surat berharga hanya 4,05 persen; naik menjadi 5,91 persen pada SBY 2 sedangkan pada Jokowi I dan II masing-masing 11,64 persen dan 12,22 persen.

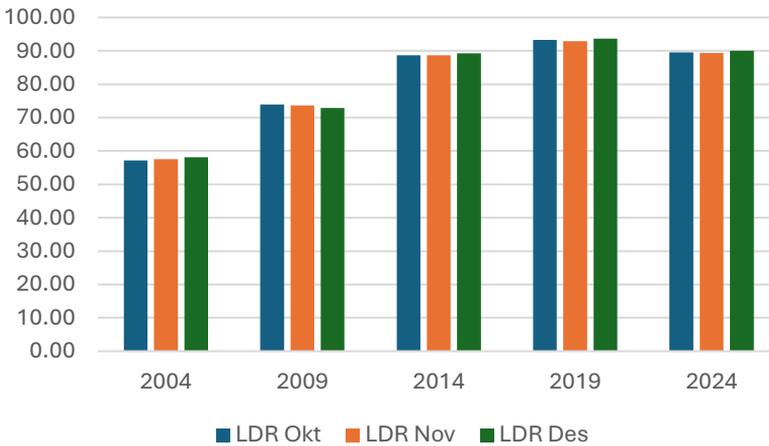
Dari sisi fungsi intermediasi keuangan dapat dijelaskan bahwa pada Desember 2024, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan mencapai 90 persen, lebih rendah dari 2019 mencapai 93,64 persen. Pertumbuhan kredit pada 2004 berada pada *double digit*, mencapai 24,7 persen (yoy). Pertumbuhan kredit sempat

melambat pada 2009 dan mulai meningkat pada 2014. Tahun 2019, pertumbuhan kredit mencapai 5,85 persen (yoy) sedangkan pada 2024 mencapai 9,1 persen.



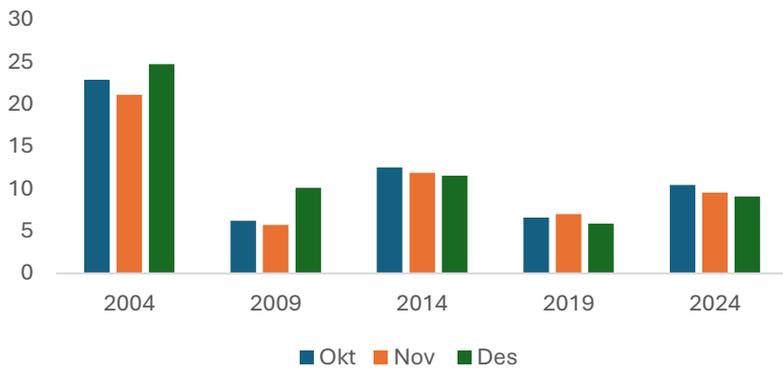
### Grafik Porsi Penyaluran Dana Bank ke Kredit dan Surat Berharga

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2025, diolah



### Grafik Perkembangan LDR

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2025, diolah



### Grafik Perkembangan Pertumbuhan Kredit

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2025, diolah

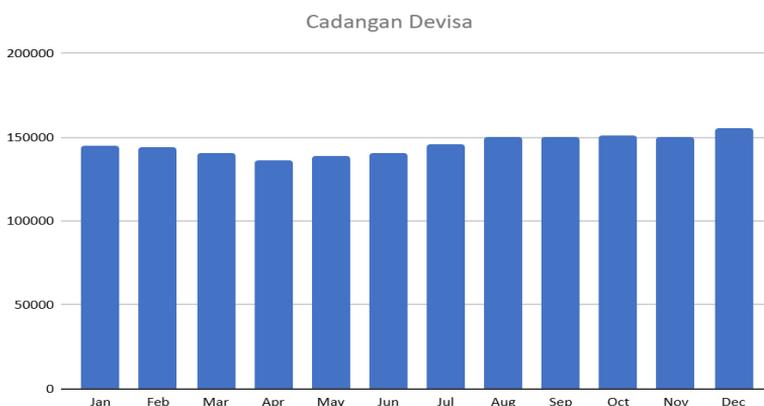
The background features a grid with a large green arrow pointing upwards and to the right. Silhouettes of business professionals are shown: one on the left pointing with a pen, and others in the center and right. In the foreground, there are blue 3D architectural models of buildings. A solid orange horizontal bar is located on the left side of the page.

# **100 HARI CAPAIAN BEBERAPA INDIKATOR KEUANGAN**

# 100 HARI CAPAIAN BEBERAPA INDIKATOR KEUANGAN

## *Cadangan Devisa Negara*

Ketersediaan cadangan devisa pada 100 hari pemerintahan Prabowo Cadangan devisa pemerintahan Prabowo selama Oktober hingga Januari menunjukkan tren yang stabil dan meningkat, didorong oleh surplus perdagangan dan pengelolaan sektor eksternal yang efektif

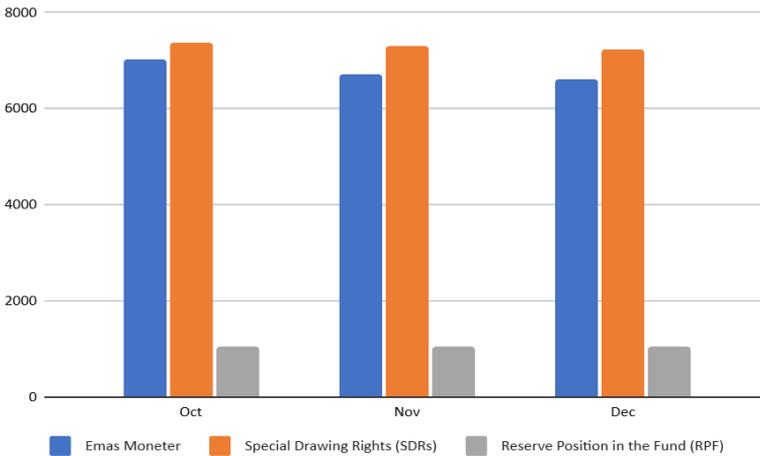


Sumber: Bank Indonesia, diolah INDEF (2025)

## **Tren Cadangan Devisa Jan-Des 2024**

Cadangan devisa selama periode Oktober hingga Desember menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Pada bulan Oktober, cadangan devisa sudah berada pada level tinggi, dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya di bulan Desember. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan sektor perdagangan luar negeri, terutama didukung oleh surplus neraca perdagangan yang signifikan. Kenaikan ekspor komoditas utama seperti batu bara dan minyak sawit, yang didorong oleh tingginya permintaan global dan harga yang

kompetitif, menjadi kontributor utama peningkatan devisa ini. Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah dan masuknya arus modal asing melalui investasi portofolio turut memperkuat posisi cadangan devisa.



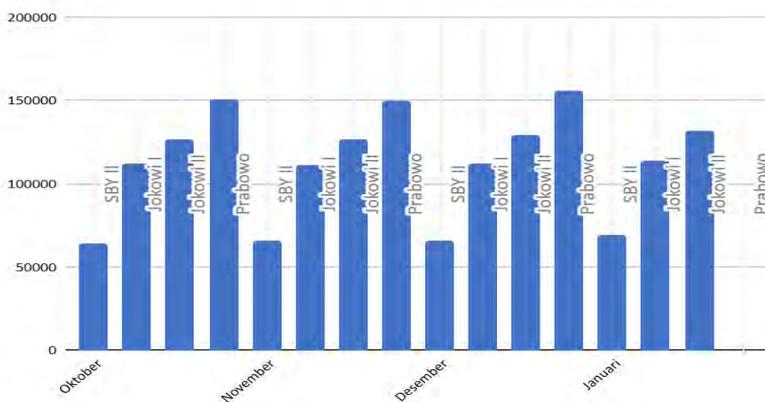
Sumber: Bank Indonesia, diolah INDEF (2025)

## Indikator Cadangan Devisa 100 Hari Pertama Prabowo-Gibran

Indikator cadangan devisa selama 100 hari pemerintahan Prabowo menunjukkan stabilitas yang baik, dengan dominasi SDRs sebagai sumber utama likuiditas internasional. Namun, peningkatan optimalisasi cadangan emas moneter dan keterlibatan lebih besar dalam RPF dapat memperkuat posisi cadangan devisa secara keseluruhan. Pemerintah perlu terus menjaga keseimbangan ini sambil memanfaatkan momentum positif dari surplus perdagangan untuk menambah kekuatan cadangan devisa nasional.

Namun, keberlanjutan tren ini tetap menghadapi tantangan, terutama ketergantungan pada ekspor komoditas primer yang rentan terhadap fluktuasi harga global dan perubahan

permintaan mitra dagang utama. Diversifikasi ekspor dan penguatan sektor manufaktur bernilai tambah menjadi penting untuk mengurangi risiko eksternal tersebut. Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas nilai tukar dan meningkatkan daya saing produk domestik agar momentum positif ini dapat dipertahankan, sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi stabilitas ekonomi jangka panjang.



Sumber: Bank Indonesia, diolah INDEF (2025)

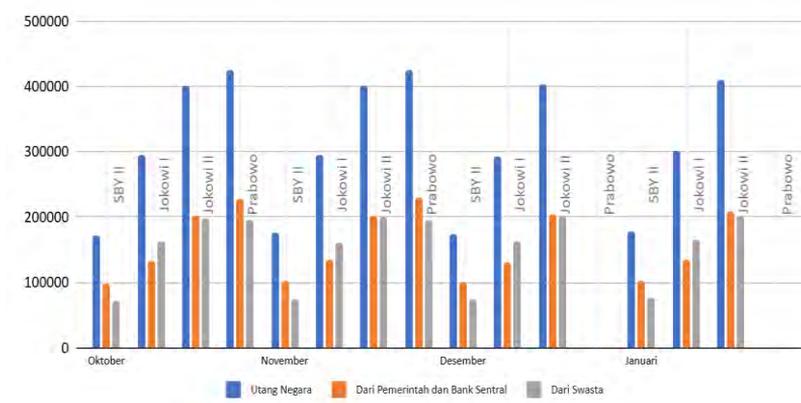
### **Komparasi Tren Cadangan 100 Hari Pertama Beberapa Rezim Pemerintahan**

Dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, tren ini mencerminkan langkah awal yang positif, meskipun masih sedikit di bawah capaian Jokowi II. Pemerintah perlu terus memperkuat diversifikasi ekspor, mengurangi ketergantungan pada komoditas primer, dan menjaga stabilitas nilai tukar untuk mempertahankan momentum ini. Dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya, pada pemerintahan SBY II, cadangan devisa relatif lebih rendah akibat tekanan ekspor yang lebih lemah serta tantangan dalam menjaga stabilitas arus modal masuk. Cadangan devisa pada periode ini menunjukkan peningkatan moderat, tetapi stabilitasnya tidak sekuat

pemerintahan Prabowo karena dampak kebijakan penghapusan subsidi BBM dan tekanan nilai tukar. Jokowi II mencatat cadangan devisa tertinggi dalam grafik ini, mencerminkan keberhasilan hilirisasi komoditas dan peningkatan nilai tambah ekspor. Pemerintahan Prabowo masih sedikit di bawah level ini tetapi menunjukkan tren yang positif.

### Utang Negara

Utang negara pada pemerintahan Prabowo terlihat mengalami tren peningkatan dari Oktober hingga Januari, meskipun tidak setajam pada pemerintahan sebelumnya seperti Jokowi II. Peningkatan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh kebutuhan pembiayaan program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan berbagai belanja sosial, di tengah tekanan fiskal akibat defisit APBN.



Sumber: Bank Indonesia, diolah INDEF (2025)

### Komparasi Tren Utang 100 Hari Pertama Beberapa Rezim Pemerintahan

Utang dari pemerintah Prabowo dan bank sentral dalam 100 hari pertama menunjukkan pertumbuhan stabil tetapi tidak signifikan. Hal ini mencerminkan pendekatan hati-hati dalam

mengandalkan utang domestik untuk pembiayaan, kemungkinan untuk mengurangi risiko nilai tukar dan eksposur terhadap pasar internasional. Tren ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo belum sepenuhnya bergantung pada instrumen utang domestik seperti Surat Utang Negara (SUN). Adapun utang dari sektor swasta relatif konstan selama periode ini, menandakan stabilitas dalam kepercayaan pelaku ekonomi terhadap iklim investasi di Indonesia. Pemerintah tampaknya menjaga agar sektor swasta tidak terlalu terbebani utang memastikan kesinambungan investasi domestik.

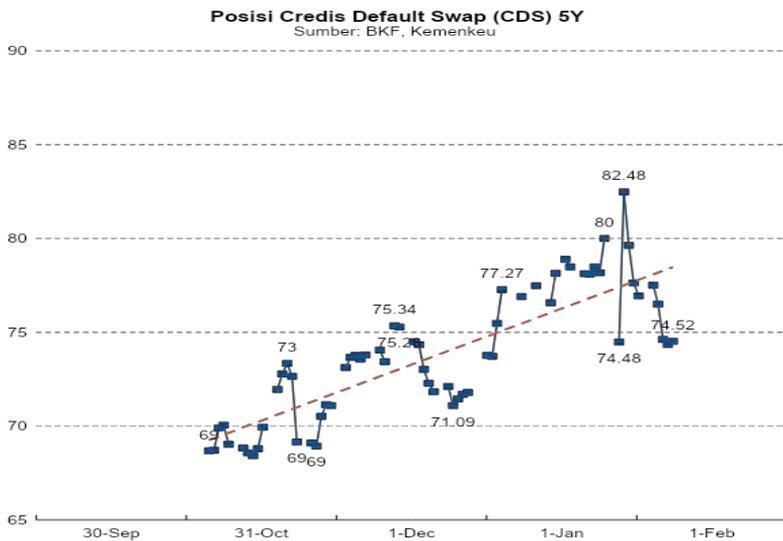
Dibandingkan dengan SBY II dan Jokowi II, pemerintahan Prabowo menunjukkan tren yang lebih moderat dalam peningkatan utang. Hal ini menandakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan ekonomi global dan tekanan belanja domestik. Utang negara pada periode SBY II cenderung lebih terkendali meskipun ada kenaikan di beberapa bulan. Hal ini disebabkan oleh fokus pada pengurangan subsidi BBM dan belanja publik yang lebih terarah. Periode Jokowi II menunjukkan lonjakan signifikan dalam utang negara, terutama karena peningkatan pembiayaan proyek infrastruktur besar-besaran. Pemerintah tampaknya mengutamakan stabilitas fiskal dengan mengendalikan peningkatan utang domestik dan menjaga kontribusi sektor swasta.

### Posisi Kredit dan Risiko Gagal Bayar

Credit Default Swap (CDS) adalah instrumen keuangan yang mencerminkan risiko kredit suatu negara. Peningkatan nilai CDS menunjukkan peningkatan risiko gagal bayar (default), sementara penurunan CDS menunjukkan penurunan risiko dan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap kemampuan negara untuk memenuhi kewajibannya.

100 hari pertama pemerintahan Prabowo menunjukkan tantangan signifikan dalam pengelolaan utang dan risiko gagal bayar. Meskipun peningkatan utang dapat dimaklumi untuk mendukung program pembangunan, pengelolaan fiskal yang lebih efektif dan strategi mitigasi risiko yang jelas diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar. Pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk mengatasi tekanan ini, terutama melalui optimalisasi penerimaan pajak, pengelolaan utang yang hati-hati, dan penguatan sektor ekspor.

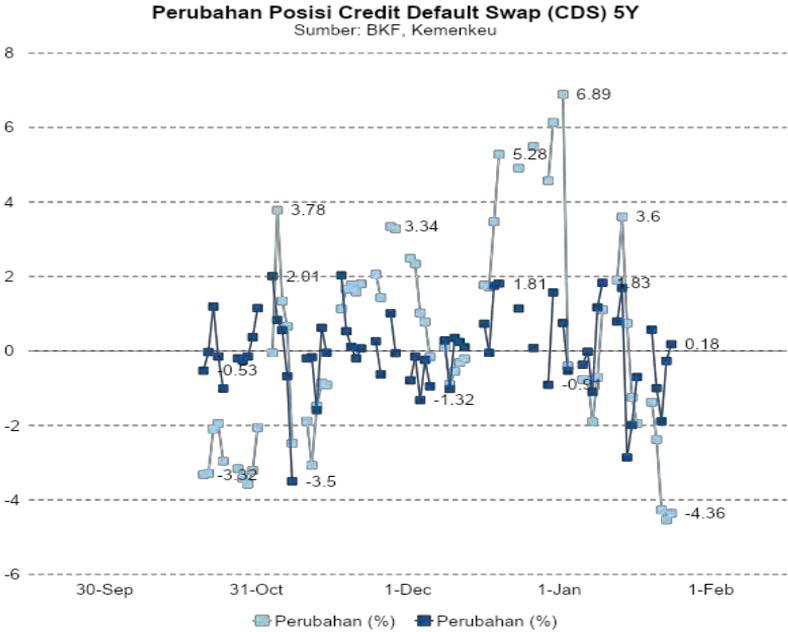
Menunjukkan tren utang yang cenderung meningkat selama 100 hari pertama. Hal ini mencerminkan tekanan fiskal yang tinggi, terutama untuk membiayai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan investasi lainnya, di tengah kebutuhan pembayaran utang jatuh tempo. Terdapat beberapa fluktuasi signifikan pada indikator risiko gagal bayar, dengan puncaknya terjadi pada titik tertentu. Ini bisa mengindikasikan adanya tantangan likuiditas, terutama jika kemampuan membayar utang tidak diimbangi oleh pertumbuhan penerimaan negara.



Sumber: BKF dan Kemenkeu, diolah INDEF (2025)

### Posisi CDS Sept-Des 2024 dan Jan 2025

Tren perubahan CDS Indonesia menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh ketidakpastian global dan tekanan fiskal domestik. Lonjakan CDS menunjukkan peningkatan risiko kredit dalam periode tertentu, sedangkan penurunan CDS mencerminkan stabilitas yang mulai pulih. Pemerintah perlu menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat sektor ekspor, dan mengelola utang secara hati-hati untuk memitigasi risiko CDS di masa depan.



Sumber: BKF dan Kemenkeu, diolah INDEF (2025)

**Perubahan Posisi CDS Sept-Des 2024 dan Jan 2025**



## **REKOMENDASI KEBIJAKAN**

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Beberapa rekomendasi yang disarankan:

- Pemerintah Prabowo-Gibran perlu mempercepat hilirisasi industri dan diversifikasi ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas primer serta meningkatkan daya saing produk manufaktur.
- Di sektor manufaktur, pemerintah Prabowo-Gibran perlu memberikan berbagai insentif bagi industri strategis serta meningkatkan efisiensi rantai pasok untuk memastikan PMI tetap berada di zona ekspansi. Penguatan pasar domestik juga penting untuk mengurangi dampak perlambatan ekonomi global, dengan mendorong investasi dan memfasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
- Pemerintah Prabowo-Gibran perlu mempercepat hilirisasi industri, memperluas basis pajak, serta mengelola utang dengan seimbang untuk menjaga stabilitas fiskal dan mengurangi risiko gagal bayar.
- Untuk menjaga surplus neraca perdagangan, pemerintah Prabowo-Gibran harus menarik investasi asing (*foreign direct investment*), serta memperkuat kepercayaan pasar melalui kebijakan yang transparan dan strategi fiskal yang kredibel menjadi kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi jangka panjang.
- Efisiensi anggaran akan mengurangi pada permintaan barang dan jasa yang berimplikasi pada penawaran dan produktivitas serta penyerapan tenaga kerja. Hal ini berpotensi mengurangi pertumbuhan PDB sektoral.
- Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah perlu juga dialihkan pada sektor yang memiliki dayadorong besar terhadap peningkatan produktivitas dan perekonomian.

- Pemerintah perlu memperbaiki pengeluaran untuk pembiayaan MBG ke depan melalui berkolaborasi pihak swasta dan lembaga filantropi, sehingga beban APBN tidak begitu berat.
- Pembiayaan MBG dapat dikolaborasikan dengan kegiatan eksisting yang mempunyai output yang searah untuk menurunkan *stunting*, meningkatkan kesehatan dan pendidikan.
- Perlunya *exit* program dari berbagai program bantuan sosial agar bisa mandiri dan berdiri sendiri serta keluar dari kemiskinan, dengan begitu dananya bisa dialihkan ke program lain untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan.
- Pemerintah harus fokus menjaga daya beli masyarakat sebagai determinan pertumbuhan ekonomi dan upaya percepatan angka kemiskinan. Penurunan inflasi 2024 belum mencerminkan perbaikan ekonomi masyarakat. Harga komoditas pangan utama masih naik, nilai tukar petani turun (tanaman pangan dan perikanan). Sebagaimana dipahami, lumbung kemiskinan berada pada sektor tanaman pangan dan perikanan.
- Untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi Prabowo-Gibran harus menjaga melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terukur, guna mendukung daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga.
- Perekonomian membutuhkan dukungan pembiayaan besar melalui kredit perbankan. Oleh karena itu perlu dukungan melalui penurunan suku bunga kredit, bukan hanya oleh otoritas moneter tetapi juga perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alesina, A. (1997). *Political cycles and the macroeconomy*. MIT Press.
- Aparicio, S., Urbano, D., & Audretsch, D. (2016). Institutional factors, opportunity entrepreneurship and economic growth: Panel data evidence. *Technological forecasting and social change*, 102, 45-61.
- Barro, R. J. (1996). Determinants of economic growth: A cross-country empirical study. *NBER*
- Bank Indonesia. (2024). Analisis Inflasi Bulanan. Bank Indonesia.  
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/default.aspx?Kategori=analisis%20inflasi&Periode=bulanan>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Inflasi Tahunan (Y-on-Y) 38 Provinsi (2022=100) (Persen). Badan Pusat Statistik.  
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI2MyMy/inflasi-tahunan--y-on-y--38-provinsi--2022-100---persen-.html>
- Bank Indonesia. (2024). Statistik Utang Luar Negeri Bank Indonesia. Bank Indonesia.  
<https://www.bi.go.id/en/statistik/ekonomi-keuangan/sulni/Default.aspx>
- Badan Kebijakan Fiskal. (2024). Laporan Ekonomi dan Keuangan Harian. Kementerian Keuangan.  
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/analisis/laporan-ekonomi-dan-keuangan-harian>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Nilai Neraca Perdagangan (Juta US\$). Badan Pusat Statistik.  
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table?subject=531>

- Bjørnskov, C. (2012). How does social trust affect economic growth?. *Southern Economic Journal*, 78(4), 1346-1368.
- CNN Indonesia. (2024, Oktober 17). *Alasan Prabowo batal bentuk Badan Penerimaan Negara*. Diakses pada 28 Januari 2025, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241017175323-532-1156575/alasan-prabowo-batal-bentuk-badan-penerimaan-negara>
- Carlsson-Szlezak, P. & Swartz, P. (2024). *Shocks, Crises, and False Alarms*. Harvard Business Review Press.
- Dalio, R. (2022). *Principles for navigating big debt crises*. Simon and Schuster.
- Ekananda, M. (2022). Role of macroeconomic determinants on the natural resource commodity prices: Indonesia futures volatility. *Resources Policy*, 78, 102815.
- Karim, N. A., Al-Habshi, S. M. S. J., & Abduh, M. (2016). Macroeconomics indicators and bank stability: A case of banking in Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 18(4), 431-448.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025, Januari 17). *Kick off PHTC: Pembangunan RS lengkap berkualitas dimulai di RSUD Reda Bolo, Kab. Sumba Barat Daya*. Diakses pada 28 Januari 2025, dari <https://yankes.kemkes.go.id/read/2415/kick-off-phtc-pembangunan-rs-lengkap-berkualitas-dimulai-di-rsud-reda-bolo-kab-sumba-barat-daya>
- Kompas.com. (2025, Januari 5). *Program makan bergizi gratis dimulai, 190 dapur MBG siap beroperasi di 26 wilayah*. Diakses pada 28 Januari 2025, dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/05/2057>

[3731/program-makan-bergizi-gratis-dimulai-190-dapur-mbg-siap-beroperasi-di-26?page=all](#)

Kompas.com. (2025, Januari 6). *Penerimaan pajak dari kenaikan PPN 12% diprediksi capai Rp 35 triliun*. Diakses pada 28 Januari 2025, dari [https://money.kompas.com/read/2025/01/06/184928326/penerimaan-pajak-dari-kenaikan-ppn-12-diprediksi-capai-rp-35-triliun#:~:text=Teuku%20Muhammad%20Valdy%20Arif&text=KOMPAS.com%20%2D%20Kementerian%20Keuangan%20\(.hingga%20Rp%203%2C5%20triliun\)](https://money.kompas.com/read/2025/01/06/184928326/penerimaan-pajak-dari-kenaikan-ppn-12-diprediksi-capai-rp-35-triliun#:~:text=Teuku%20Muhammad%20Valdy%20Arif&text=KOMPAS.com%20%2D%20Kementerian%20Keuangan%20(.hingga%20Rp%203%2C5%20triliun))

Liputan6.com. (2024, Desember 30). *Kenaikan PPN 12 persen tak signifikan bagi penerimaan negara dan jadikan dunia usaha kolaps, benarkah?*. Diakses pada 28 Januari 2025, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5855961/kenaikan-ppn-12-persen-tak-signifikan-bagi-penerimaan-negara-dan-jadikan-dunia-usaha-kolaps-benarkah?page=3>

Pemerintah Kabupaten Rembang. (2025, Januari 25). *Mulai Februari, warga Rembang bisa nikmati pemeriksaan kesehatan gratis*. Diakses pada 28 Januari 2025, dari <https://rembangkab.go.id/berita/mulai-februari-warga-rembang-bisa-nikmati-pemeriksaan-kesehatan-gratis/>

Tempo.co. (2024, November 1). *Program 3 juta rumah Prabowo dimulai, Maruarar Sirait groundbreaking proyek pertama yang dibiayai Aguan*. Diakses pada 28 Januari 2025, dari <https://www.tempo.co/ekonomi/program-3-juta-rumah-prabowo-dimulai-maruarar-sirait->

groundbreaking-proyek-pertama-yang-dibiayai-aguan-1162485

- S&P Global. (2024). PMI, Purchasing Managers' Index – Manufacturing. S&P Global. <https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/solutions/products/pmi>
- Liang, C., Hong, Y., Huynh, L. D. T., & Ma, F. (2023). Asymmetric dynamic risk transmission between financial stress and monetary policy uncertainty: thinking in the post-covid-19 world. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 60(4), 1543-1567.
- Mishkin, F. S. (2007). *Monetary Policy Strategy*. MIT Press.
- Olilingo, F. Z., & Putra, A. H. P. K. (2020). How Indonesia economics works: Correlation analysis of macroeconomics in 2010-2019. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(8), 117-130.
- Ostrom, E. (2020). Beyond markets and states: Polycentric governance of complex economic systems. In *Shaping Entrepreneurship Research* (pp. 353-392). Routledge.
- Romer, D. (2019). *Advanced Macroeconomics 5th ed.* McGraw Hill.
- Sasongko, G., & Huruta, A. D. (2018). Monetary policy and the causality between inflation and money supply in Indonesia. *Business: Theory and Practice*, 19, 80-87.
- Savirani, A. (2020). Post-Election Politics in Indonesia: Between Economic Growth and Increased Islamic Conservatism. *Southeast Asian Affairs*, 2020(1), 136-153.

Van der Brug, W., Van der Eijk, C., & Franklin, M. (2007). *The Economy and the Vote: Economic Conditions and Elections in Fifteen Countries*. Cambridge University Press.

Walsh, C. E. (2017). *Monetary Theory and Policy, fourth edition*. MIT Press

